

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aditya, Umar Rachman. *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Bandung, Pustaka Magister, 2015.
- Ali, Muhammad. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, 2022.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hiariej, Eddy Omar Sharif. *Teori Hukum dan Pembuktian*. Jakarta, Erlangga, 2012.
- Huda, Choirul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Ed.2., Jakarta, Kencana Prenada Kencana, 2006.
- Krismiarsi. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individu*. Bandung, Pustaka Magister, 2018.
- Lebacqz, Kurt. *Six Theories of Justice: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran JS Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Niebuhr, Jose Porfirio Miranda*. Diterjemahkan oleh Y. Santoso. Bandung, Nusamedia, 1986.
- Mertokusumo, Sudikno, et al. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta, Liberty, 1984.
- Morrison Wayne, Khozim. *Ed. Jurisprudence: From Greek to Post-Modernism*. Bandung, Nusa Media, 2019.
- Muhammad, Hafnidar. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Lhokseumawe, Unimal Press, 2019.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Yogyakarta, Alumni, 1988.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Yogyakarta, Alumni, 2008.

Remmelink Jan. *Hukum Pidana; Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Diterjemahkan oleh (T. P. Moeliono, Penerj.). Gramedia.2003.

Rozah Umi. *Azas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Semarang, Pustaka Magister, 2015.

Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.

Sjahdeini Sutan Remy. *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Jakarta, Kencana, 2017.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung, Alumni, 1981.

Sudaryono dan Natangsa. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017.

Surbakti Natangsa dan Sudaryono. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2006; Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2006; Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006; Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

C. Jurnal Ilmiah

Afrizal, Rudi, dan Kurniawan, Imam. Rehabilitasi Sebagai Tindakan dalam KUHP Nasional dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol.8 No.3, September 2024, hlm. 666-675.

Akbar, Taufik Nur, dan Hendra, Hadi. Penerapan asas *in dubio pro reo* pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Pidana. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.10 No.1, April 2021, hlm.86-98.

Capera, Budi. Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6 No.2, Agustus 2021, hlm.225-234.

Dollar, Dedi, dan Riza, Kurniawan. Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, Vol. 1 No.1, Juni 2022, hlm.13-21.

Elta, Yulfi Hidayat Tri, dan Yoserwan, Yusran. Paradigma *Critical Legal Studies* Terhadap Asas Legalitas Di Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal UNES Law Review*, Vol. 6 No. 1, Oktober 2023, hlm. 7-18.

Faiz, Paiman Mahmud. Teori Keadilan John Rawls (*John Rawls' theory of justice*). *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, April 2009, hlm. 135-149.

Frans, Muhammad Putra. Implementasi Pidana di Bawah Minimal Dalam Kasus Narkotika Berdasar Perspektif Hukum Progresif. *Supremasi: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2, April 2022, hlm.174-176.

Gustia Adrian Pah, Genta, Iriyanto, Endro, dan Wulandari, Lestari. Analisis yuridis penjatuhan pidana oleh hakim dalam tindak pidana korupsi (Putusan Nomor: 2031 K/Pid. Sus/2011). *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 1 No.1, Maret 2014, hlm. 33-41.

- Insani, Naufal. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana minimum dan maksimum pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan. *The Juris*, Vol. 7 No. 1, Juni 2023, hlm. 85-91.
- Johari, Joelman Subaidi, T. Yudi Afrizal, Fatahillah. Kedudukan asas legalitas dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No.1, Januari 2023, hlm. 65-77.
- Lamonagi, Geraldo. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba. *Lex Crimen*, Vol.11 No.3., April 2022, hlm.1-10.
- Pardede Rendra Yoki., Syahrin Alvin., Ekaputra Muhammad. (2022). Analisis yuridis terhadap penerapan sanksi pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkoba: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 775K/Pid. SUS/2020. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.3., September 2022, hlm.144-155.
- Rambe Naharuddin, Syahrin Alvi, Sunarmi, Mulyadi Mahmud. Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid. Sus/2018/PN. RAP; 762/Pid. Sus/2017/PN. Rap; 712/Pid. Sus/2017/PN. Rap. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.4, Desember 2022, hlm. 176-184.
- Rivanie Syarif Saddam, Muchtar Syamsuddin, Muin Audyna Mayasari, Prasetya A.M. Djaelan. Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 No.2, September 2022, hlm.176-188.
- Samosir Samuel Saut Martua. Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam pembuatan putusan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol.2 No.2, Oktober 2022, hlm. 139-152.
- Santoso, Jaelani., dan Rosidin. Kedudukan dan kekuatan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam hukum positif Indonesia. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1 No.4, 2023, hlm. 07-15.
- Setyawan Edo Hendra, Budi Atmojo. Implementasi pemidanaan di bawah minimum khusus dalam tindak pidana narkoba. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol.8 No.3, 2019, hlm. 227-237.
- Solehuddin. Sanksi pidana minimum khusus dalam teori dan praktik peraturan perundang-undangan. *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, Vol.5 No.1, Januari 2013, hlm.19-20.
- Wahid, dan Rafiqi. Rumah rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba: Sebuah konsep untuk restorative justice. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, September 2023, hlm. 46-64.
- Wibowo Ari, Widyatmoko Ivan Agung. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus: Studi perkara tindak pidana narkoba. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol.4 No.2, November 2021, hlm.345-369.

- Willy Muhammad., Nasir Muhammad., dan Rahman Malahayati. (2024). Implementasi Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 12 No.2, 2024, hlm.381-400.
- Zakun Mochammad Sajarod., Soetoro Erwin Owan Hermansyah, Hakim Lukman. Sanksi rehabilitasi bagi anak pecandu narkotika. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol.7 No.2, Desember 2025, hlm.1108-1120.

D. Laporan Penelitian

- Badan Narkotika Nasional. Laporan kajian hukum sistem peradilan pidana narkotika. *Badan Narkotika Nasional*.2020.
- Ramadhan, C. R., *et al.* Penelitian disparitas pemidanaan dan kebijakan penanganan perkara tindak pidana narkotika di Indonesia: Studi perkara tindak pidana narkotika golongan 1 tahun 2016-2020 (Pasal 111-116 dan Pasal 127 UU Narkotika 35/2009). *Perkumpulan Indonesia Judicial Research Society*.2022.

E. Tesis/Disertasi

- Magaba Adela Falafiona. Analisis yuridis terhadap disparitas putusan hakim pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam konsepsi kepastian hukum (Tesis Pascasarjana). Universitas Islam Sultan Agung.2023.
- Prayurisman Anggi. Penerapan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika (Tesis Pascasarjana). Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.2011.